



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT EITI INDONESIA**

**PERKEMBANGAN PROSES REKONSILIASI  
PELAPORAN EITI INDONESIA  
2010-2011**

**Sosialisasi Pelaporan Tahap II**

Disampaikan oleh  
Rekonsiliator KAP Gideon Ikhwan Sofwan  
Hotel Borobudur, 4 Februari 2014

# Status/progress report s/d *30/01/2014*

- Reporting Company

Jumlah	Operator	Non operator
170	71	99

- Operator Report

Status Laporan	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Data Tidak Lengkap
On Time(14/10)	71	33	38	-
Dec 24, 2013		38	-	10

- Non Operator / Partner Report

Status Laporan	Jumlah Pelapor	Sudah Melapor	Belum Melapor
On Time (14/10)	99	11	88
Dec 24, 2013		26	62
Jan 30, 2014		33	29

# Beberapa isu yang muncul dalam rekonsiliasi (1)

1. Tidak semua isian data dalam formulir diisi – 27% dari laporan *operator*
  - Sulit menghubungi *non operator* karena data email/phone atau alamat tidak diisi dalam laporan
  - Data yang diminta tidak diisi lengkap untuk dibandingkan dengan data penerimaan pemerintah

# Beberapa isu yang muncul dalam rekonsiliasi (2)

2. Diisi accrual walaupun yang diminta template cash basis - 10% dari laporan *operator*
  - Khususnya untuk Corporate & Dividend Tax dimana data dari Dit. PNPB adalah cash basis
  - Demikian juga untuk signature bonus dan production bonus
  - Adanya pembayaran production bonus yang di offset dengan lifting minyak

# Beberapa isu yang muncul dalam rekonsiliasi (3)

3. Kesalahan pengisian dalam volume antara in thousand dan full amount - 1% dari laporan *operator*
  - Khususnya untuk total lifting dan government lifting. Template yang diminta adalah mscf/barrel
  - Harus ada persamaan persepsi antara KKKS Migas dan SKK Migas (laporan FQR dari table mana)
  - Melaporkan dalam MBTU sedangkan yang diminta MSCF

# Beberapa isu yang muncul dalam rekonsiliasi (4)

4. Adanya adjustment dalam tahun transaksi - 4% dari laporan *operator*
  - Khususnya untuk Corporate & Dividend Tax dimana KKKS melaporkan adanya adjustment lebih/kurang bayar dilain pihak PNBPN hanya mencatat apa yang diterima cash oleh pemerintah selama tahun transaksi
  - Adanya alokasi DMO ke blok lain
  - Pembayaran disatukan untuk 2 blok

# Beberapa isu yang muncul dalam rekonsiliasi (5)

5. Tidak sesuai antara isian data dengan lampiran - 23% dari laporan *operator*
  - Khususnya untuk Corporate & Dividend Tax dan DMO fee

# Beberapa isu yang muncul dalam rekonsiliasi (6)

6. Mencoret dan mengganti pernyataan sudah sesuai dengan standard akuntansi - 2% dari laporan *operator*
  - EITI mensyaratkan bahwa laporan yang masuk harus sudah di audit sesuai dengan standard akuntansi
  - KKKS sudah di audit oleh BPKP dan KAP sehingga tidak perlu mencoret pernyataan ini



# Saran-saran dari Rekonsiliator (1)

- Karena keterlambatan tahun pelaporan EITI, banyak terjadi pergantian kepemilikan khususnya untuk non operator sehingga sulit untuk dihubungi karena pergantian pemilik – disarankan Operator memberikan data yang lengkap untuk Non Operator yang baru
- Perbedaan nama penyeter Corporate & Dividend Tax antara KKKS dan Dit.PNBP dimana Dit. PNBP masih mencatat penyeter dengan nama pemilik lama sedangkan Non Operator sudah berganti pemilik – disarankan apabila ada perpindahan pemilik agar segera menghubungi Dit. PNBP untuk pemutakhiran data

# Saran-saran dari Rekonsiliator (2)

- Kesalahan pengisian template sebagai contoh Govt Lifting diisi Govt Entitlement, Total lifting diisi Contractor Lifting – disarankan persamaan pengertian pengisian template dalam sosialisasi.
- Perbedaan persepsi dalam pelaporan JOB dan PHE – disarankan JOB body melaporkan 100% data sebagai operator sedangkan participating interest hanya melaporkan Corporate & Dividend Tax saja seperti KKKS Migas yang lainnya

TERIMA KASIH